BAB II

ISLAM DAN POLITIK ORDE BARU

A. SEKILAS TENTANG ORDE BARU

Secara politis, tumbangnya gerakan yang menamakan dirinya G 30 S/PKI pada tanggal 30 september adalah awal munculnya orde baru. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sekaligus pengangkatan Jendral Soeharto menjadi Pejabat Presiden tahun 1967 dan menjabat presiden Republik Indonesia tahun 1968, menandai surutnya dua kekuatan politik utama dalam pentas perpolitikan nasional, yaitu Soekarno dan PKI.

Gagalnya gerakan G 30 S/PKI melakukan aksi makar berdampak sosial politik yang sangat luas, terutama bagi kelompok militer. Menjelang akhir tahun 1965 dan awal-awal tahun 1966 merupakan masa-masa yang sangat kritis bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, baik parpol dan kelompok sosial keagamaan lainnya tidak mampu berbuat banyak akibat tekanan orde lama. hanya ABRI sebagai Central Of Power yang bisa berkehendak apa saja, namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh ABRI untuk merombak pemerintahan militer. Akan tetapi yang dilakukan justru mengajak kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tehnokrat untuk menata perekonomian nasional.[1]

Selain dampak-dampak diatas, yang dirasakan betul oleh rakyat banyak adalah, pertama, adanya kekacauan dan konflik dalam masyarakat akibat adanya rangkaian krisis politik yang tidak pernah selesai sejak tahun 1965. Kedua, krisis dibidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi, Laju inflasi mencapai 650%,[2] neraca pembayaran luar negeri yang sama sekali tidak berimbang dan devisa negara yang kosong.

Kelahiran orde baru selain berupaya memecahkan kesenjangan diatas, juga berupaya meluruskan dan mengoreksi upaya tindakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta menerapkannya secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang dimaksud oleh Amir Machmud bahwa orde baru pada hakekatnya adalah, pertama, suatu orde yang merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, koreksi total atas penyelewengan yang terjadi pada masa sebelumnya. Ketiga, suatu proses sosial yang panjang, sebab penyelewengan yang terjadi pada masa lampau

---

1. Thaba, Op-cit hal. 185

2. Ibid, halaman 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan bertahun-tahun sehingga menyentuh hampir seluruh segi kehidupan bangsa Indonesia.Keempat, perubahan sikap mental yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan dan yang memerlukan sikap dan pola kerja yang berorientasi pada program. Jadi perjuangan orde baru ialah menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas jangka panjang, untuk mempercepat proses pembangunan bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan idial dan konstitusional.

Proses perubahan dari orde lama ke orde baru merupakan dua masa yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Orde lama dan orde baru dengan cara dan polanya sendiri telah memberi sumbangan besar kepada usaha penumbuhan dan pengembangan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka orde lama dapat dinilai sebagai masa persiapan dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan kita kepada konklusi tentang perlunya ditempuh jalan orde baru.[2]

B. FORMAT KEBIJAKAN BARU PEMERINTAH ORDE BARU

Kegagalan orde lama untuk membangun bangsa dan

---

3. Nurcholis Madjid, Islam Kemodrenan dan Keindonesiaan, Mizan Bandung cet. ketiga 1987 hal. 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara menjadi catatan sejarah tersendiri bagi pemerintah orde baru. Kegagalan untuk menata seluruh aspek kehidupan sosial, politik, berbangsa dan bernegara, disadari betul oleh rezim orde baru. Oleh karenanya diperlukan sebuah konsep/format untuk mengatur strategi roda pemerintahan sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Adalah Modernisasi nampaknya yang dijadikan oleh pemerintah sebagai jargon pembangunan. Dipilihnya modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka landasan pembangunan bangsa, karena dianggap sebagai satu-satunya alternatif dalam memajukan bangsa Indonesia setelah pemerintah rezim sebelumnya dianggap gagal memenuhi tuntutan dan harapan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, konsekuensinya adalah dengan memacu modernisasi di pelbagai bidang, apakah dalam pengadaan dan pengendalian permodalan maupun dalam bidang tehnologi.[3]

Strategi pemerintah orde lama yang terlalu kuat berorientasi pada idiologi dan politik, dinilai oleh pemerintah orde baru telah membawa ketidakstabilan politik dan kehancuran ekonomi yang menyengsarakan

---

4. Ridwan Saidi, Islam Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan, Pustaka Panjimas Jakarta hal. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat. Oleh karenanya pemerintah orde baru merasa perlu melakukan modernisasi politik sebagai kebijakan penting yang dianggap bisa mendukung suksesnya pembangunan ekonomi.

Adalah suatu asumsi, bahwa pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan dalam iklim politik yang stabil dan mantap. Karenanya pemerintah melakukan penataan kembali (restrukturisasi) politik guna menciptakan format baru politik yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.[4]

Pilihan kepada modernisasi juga diharapkan dapat menarik dukungan dari negara-negara barat atau investor asing, agar dapat memberikan bantuan bagi pelaksanaan pembangunan pada masa awal-awal orde baru. Cara ini ditempuh karena pemerintah orde baru tidak melihat alternatif lain untuk menarik dukungan finansial bagi pembangunan, kecuali dari negara-negara barat yang saat itu secara ekonomis sudah maju.

Sekalipun demikian, para elite orde baru juga menyadari bahwa pilihan terhadap modernisasi membawa konsekuensi tersendiri bagi munculnya proses transformasi kultural dan pembaharuan sosial yang tidak

---

5. Drs. Azumardi Azra, pengantar dalam, Islam Pembangunan politik dan politik Pembangunan, Ridwan Saidi, Pustaka Panjimas Jakarta 1983, hal. XI - XII

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu sejalan dengan nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang.

Selama dua dasawarsa orde baru masalah modernisasi ditanggapi dalam tiga kerangka. Pertama, modernisasi dilihat sebagai suatu proses penyebaran nilai nilai yang sejalan dengan ekspansi kekuatan ekonomi dan politik Barat. Sebagian nilai-nilai itu bisa disebut universal, tetapi bisa juga disebut etnosentris Eropha Barat atau Amerika Utara. Dari sudut ini modernisasi pada umumnya dilihat sebagai proses transnasionalisasi.

Kedua, modernisasi dilihat sebagai keharusan sejarah yang akan melanda seluruh dunia dan karena itu perlu ditanggapi, terlepas dari perasaan suka atau duka. Ketiga, mencoba menilai secara kritis, baik modernisasi maupun tradisi. Modernisasi memang suatu keharusasn sejarah. Tetapi bagaimanapun juga modernisasi itu tidak bisa ditanggapi secara ahistoris, dengan melepaskan nilai-nilai dari konteksnya. Tradisi juga perlu dilihat dengan cara yang sama, karena itu tradisi perlu lebih dipertimbangkan dari pada dicurigai. Sebab tradisi didunia ketiga adalah bagian dari sejarah dan karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan konteks dalam proses perubahan nilai.[5]

Selanjutnya, dalam bidang politik, rezim yang berkuasa dihadapkan pada upaya menciptakan sebuah format politk baru. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya optimisme masyarakat sekeluarnya mereka dari suatu masa yang merugikan. Optimisme akan kehidupan baru yang lebih baik, lebih demokratis, lebih aman dan lain sebagainya. Format politik yang tercipta antara lain ditandai oleh :

1. Peranan Eksekutif (negara) sangat kuat karena dijalankan oleh militer setelah ambruknya Demokrasi Terpimpin dan manjadi satu-satunya pemain utama diatas panggung politik nasional. Legitamasi peranan mereka dihadirkan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI.
2. Upaya membangun sebuah kekauatan organisasi politik sipil sebagai perpanjangan tangan ABRI (dan penerintah karena sampai hampir dua dekade sejak munculnya orde baru, sulit membedakan pemerintah dengan ABRI) dalam bidang politik orpol ini adalah Golkar, sebaliknya dengan segala cara dilakukanlah "pembesaran" Golkar, sebaliknya "pengecilan partai-partai politik. Upaya ini berhasil setelah pemilu

---

6. M. Dawam Rahardjo, Basis Sosial Pemikiran Islam, Prisma no.5 1991. hal. 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1971 dengan terciptanya sistem kepartaian yang hegemonik.

3. Penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses dipolitisasi masa, misalnya dengan menerapkan konsep Floating Mass (massa mengambang) dan konsep NKK/BKK didalam kehidupan kampus.
4. Tekanan pada pendekatan keamanan (security approach) dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dalam pembangunan politik untuk menciptakan stabilitas politik.
5. Menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dalam korporatis. Korporatisme negara menyerap semua unsur dalam masyarakat, menjadikan birokrasi "ibarat gurita yang sangat perkasa, memangsa semua lawannya", sedangkan posisi masyarakat lemah. Dalam setiap proses pengambilan keputusan politik nasional, misalnya, masyarakat masyarakat hampir belum pernah dilibatkan. Masyarakat dilibatkan hanya pada tahap pelaksanaannya. Masyarakat sangat mudah dimobilisasi untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan pemerintah.[6]

---

7. Thaba, Op-cit hal. 188-189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. SIKAP UMAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN ORDE BARU

Dalam dasa warsa 60-an, tema modernisasi masih terlalu awam bagi rakyat Indonesia pada umumnya, bahkan termasuk hal baru dikalangan umat Islam. Hal tersebut bila dibandingkan dengan negara Asia lain yang sudah lama menerapkan sistem modernisasi, Indonesia termasuk penumpang gerbong terakhir yang mengadopsi teori barat tersebut.

Kebijakan (policy) yang diambil pemerintah tersebut, pada dasarnya untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi politik rakyat, selain dimaksudkan sebagai upaya menarik dukungan negara-negara barat atau investor asing untuk bisa memberikan bantuan bagi pelaksanaan pembangunan di awal orde baru.

Akan tetapi, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi umat Islam. Sebab mereka berkeyakinan bahwa modernisasi adalah isu yang sengaja digulirkan oleh negara-negara barat yang tak lain adalah Faham Westernisasi. Menghadapi masalah ini umat Islam dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, ikut berpartisipasi atau mendukung kebijakan rezim orde baru yang berarti mendukung modernisasi yang nyata-nyata berkiblat pada barat. Kedua, menolak dengan konsekuensi kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam program pembangunan yang sudah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak termasuk pihak diluar Islam.[7]

Dilema tersebut menimbulkan perbedaan dikalangan umat Islam dalam menanggapi modernisasi yang secara garis besarnya dikemukakan dalam beberapa pola. Pertama, pola apologi, namun diikuti dengan usaha penyeseuaian diri dan adaptasi terhadap proses modernisasi. Kedua, juga melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai westernisasi dan sekularisasi. Ketiga, adalah pola tanggapan yang kreatif dengan menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi.

Dikalangan angkatan tua golongan modernis, terutama yang pernah menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi, lebih menekankan repolitisasi Islam sebagai upaya menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan mendesak pemerintah orde baru merehabilitasi Masyumi. Sedangkan kelompok yang lebih muda yang berada diluar kepengurusan Masyumi, cenderung memperjuangkan rehabilitasi material, artinya lebih

---

8. M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim, Mizan Bandung 1993, hal. 381-382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertarik untuk aktif berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik orde baru. Bagi mereka ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis.

D. GAGALNYA REHABILITASI MASYUMI DAN TERBENTUKNYA PARTAI MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI)

Perbedaan pandangan mengenai partisipasi politik umat Islam di era orde baru antara kelompok senior dan kelompok yunior, menjadikan dua model perjuangan umat Islam saat itu. Di satu sisi, kelompok senior memandang rehabilitasi dan repolitisasi Islam sebagai hal yang sangat urgen. Sementara, kelompok muda lebih berfikir tentang jangka panjang. Mereka lebih tertarik dalam kegiatan membangun masyarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran daripada terjun langsung ke arena politik atau masuk birokrasi.

Namun demikian, usaha-usaha merehabilitasi Masyumi tersebut, diawal-awal orde baru itu tampaknya terus bergulir dan bahkan mendapat dukungan kuat dari para simpatisannya. Usaha ini cukup membawa hasil, diantaranya dengan berdirinya Badan Koordinasi Amal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim (BKAM) tanggal 16 Desember 1965 yang mempersatukan 16 organisasi Islam dengan tujuan pokok rehabilitasi Masyumi.[8]

Usaha untuk merehabilitasi Masyumi didasarkan pada pandangan bahwa bubarnya Masyumi merupakan bagian dari gerakan politik PKI. Selain itu, umat Islam dan pemerintah telah berhasil menumpas pemberontakan PKI. Untuk itu umat Islam beranggapan bahwa rehabilitasi Masyumi merupakan konsekuensi logis sikap pemerintah terhadap bubarnya PKI itu sendiri.[9] Akan tetapi, logika tersebut tidak berlaku dikalangan pemerintah khususnya ABRI. Larangan pemerintah ini dilandasi oleh pemikiran kekuatiran sikap oposan dan pembangkangan dari Masyumi yang dapat mengakibatkan berbagai konflik politik, khususnya mengenai dasar negara yang dapat merugikan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan idiologi, peranan partai-partai politik dan lain sebagianya yang bercorak idiologis-politis. Kekuatiran akan semakin menguatnya militansi Islam ini

---

9. Anwar, Op-cit hal 27

10. Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri, Sipers, Yogyakarta 1992, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi agenda utama pembicaraan para elite politik orde baru. Trauma masa lalu, "pembangkangan" tokoh-tokoh Islam dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan.

Lebih jauh lagi, setelah munculnya "pernyataan Desember ABRI" tertanggal 21 Desember 1966 yang ditujukan pada Soekarno untuk mencegah kegiatannya lebih lanjut. Akan tetapi, pernyataan ini juga menekankan bahwa "militer akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun dari pihak manapun dan golongan apapun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Darul Islam... dan Masyumi - partai sosialis Indonesia ..."[10]

Berkenaan dengan pernyataan diatas, Prawoto (mantan Ketua Umum Masyumi) mengirimkan surat kepada Ketua Presidium Kabinet Jendral Soeharto, yang intinya merasa keberatan atas pernyataan bahwa Masyumi disenafaskan dengan PKI. Surat dari Prawoto ini mendapat tanggapan dari Jendral Soeharto tanggal 6 Januari 1967, mengenai keberatan merehabilitasi Masyumi. Atas alasan-alasan ketatanegaraan dan psikologi telah membawa ABRI

---

11. Thaba, Op-cit hal. 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada satu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi.[11]

Tanggapan Jendral Soeharto diatas sangat mengecewakan Prawoto pribadi dan para pendukung Masyumi lainnya, yang semula banyak menaruh harapan kepada pemerintah orde baru. Melihat hal tersebut, para pendukung rehabilitasi mencoba mencari jalan lain dengan memberikan dukungan kepada Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM), guna melicinkan jalan untuk mendirikan Parmusi. Akhirnya disetujui untuk membentuk Partai baru dengan nama Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) tanggal 7 April 1967.

Sebagai Ketua Umum Parmusi, pemerintah menunjuk H. Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Sekretaris jendral. Kepemimpinan dua orang ini dianggap sementara dan akan disempurnakan pada kongres yang berlangsung di Malang tahun 1968. Pada kongres ini yang menjadi calon terkuat untuk menjadi Ketua Umum Parmusi adalah Mohammad Roem, mantan tokoh Masyumi. Namun pemerintah tidak menyetujui bekas tokoh Masyumi ini untuk menjadi Ketua Umum di Parmusi.

Semula pembentukan Parmusi oleh sebagian umat

---

12. Sulastomo, Hari-hari Yang Panjang 1963-1966, CV. Haji Masagung Jakarta 1989 hal. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, partai itu dianggap sebagai pengganti Masyumi, tapi bagi pemerintah, Parmusi harus menjadi partai yang tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi. Sehingga mantan tokoh-tokoh Masyumi tidak diperkenankan menduduki kursi kepengurusan di Parmusi. Sekali lagi terlihat jelas intervensi atau campur tangan pemerintah saat itu begitu kuat mengontrol perjalanan partai politik Islam tersebut.

Dengan kondisi ini muncul konflik dalam tubuh Parmusi sendiri. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap keputusan pemerintah. Ketika terjadi konflik ini, DJ. Naro dan Imran Kadir (Naroka) mengecam kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun dengan cara merebut kekuasaan kedua orang tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 1970, Djarnawi memecat J. Naro dan Imran Kadir karena dianggap melanggar Organisasi. Konflik ditubuh Parmusi terus berlanjut, sampai akhirnya Presiden Soeharto turun tangan, kemudian mengangkat HMS. Mintaredja dan sulastomo menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Parmusi melalui SK. no. 77 tanggal 20 November 1970.[12]

Pemerintah menolak tampilnya tokoh-tokoh Masyumi

---

13. Thaba, Op-cit hal. 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada keterlibatannya dalam gerakan PRRI. Akan tetapi setelah umat menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap bersih dari PRRI ternyata pemerintah tetap menolak, maka alasan pemerintah tersebut menjadi gugur dan tidak mendasar.[13]

E. PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Ketika Pemilu pertama di masa orde baru berlangsung pada tahun 1971, terdapat sembilan partai kontestan yang ikut dalam pemilu tersebut. Diantara sembilan partai tersebut adalah :

1. Partai Katholik
2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
3. Partai Nahdlatul Ulama
4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
5. Golongan Karya
6. Murba
7. Partai Kristen Indonesia
8. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (perti)
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

Dari sembilan partai kontestan pemilu, Umat Islam diwakili 4 partai, yaitu, Nahdlatul Ulama, Perti, PSII

---

14. Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos..., hal. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Parmusi. Golkar pada saat itu termasuk partai baru. Semula organisasi ini bernama Sekretariat Bersama (Sekber)Golkar, yaitu suatu kumpulan longgar perhimpunan-perhimpunan yang tidak berafiliasi partai kebanyakan dibawah pengaruh atau kendali angkatan bersenjata.

Seyogyanya, pemilihan Umum pertama di masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1968, ditundanya pemilu 1968 samapai tahun 1971, menurut pengamat antara lain disebabkan :

1. Usaha pemerintah untuk memperoleh jaminan agar persoalan dasar negara tidak diubah dan tidak menjadi program partai serta tidak muncul dalam kampanye.
2. Usaha pemerintah untuk membuat keseimbangan antara anggata DPR dari luar jawa dengan jawa
3. Usaha pemerintah untuk mengangkat 100 orang dari 460 DPR oleh pemerintah dan 307 anggota MPR dari 920 anggota termasuk 100 yang mewakili golongan fungsional; tentara, politisi dan intelektual.[14]

Menjelang pemilu pertama di era orde baru, Seluruh partai politik baik dari kalangan Islam maupun

---

15. Abdul Munir Mulkhan, Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965 - 1987 Dalam Perspektif Sosiologi, Rajawali Pers, Jakarta 1989 hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Non-Islam sudah mulai mempersiapkan diri dalam ajang demokrasi orde baru. Dari Partai Islam diwakili oleh empat partai, yaitu Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti dan PSII.

Akhirnya pemilihan umum pertama pada masa orde baru berlangsung tahun 1971. Nahdlatul Ulama mendapat peroleh suara 18,67 %, Parmusi 7,365 %, PSII 2,39 %, sedangkan Perti hanya 0,70 %, jumlah suara yang dicapai oleh partai-partai Islam itu hanyalah 29 %. Sebagai perbandingan Golongan Karya sndiri mendapat 62,8 %, sedangkan PNI 6,4 %. Adapun Parkindo dan Partai Katholik meraih 2,45%.[15] Selanjutnya akan kita bahas perjalanan empat parpol Islam yang mewakili umat dalam pentas politik nasional.

a. NAHDLATUL ULAMA

Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Pada awal berdirinya disebut Jam'iyah NU dan belum merupakan partai politik. Ada tiga faktor utama yang mendorong didirikannya organisasi ini. Pertama, karena rasa tanggung jawab yang besar dari para alim ulama akan kemurnian serta keluhuran agama

---

16. Tamara, Op-cit hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, mengingat kuatnya usaha Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam untuk kepentingan penjajahan dengan jalan infiltrasi keagamaan. Kedua, rasa tanggung jawab yang dari para alim ulama sebagai pemimpin umat sebagai penerus perjuangan kemerdekaan tanah air dan bebas dari belenggu penjajahan. Ketiga, rasa tanggung jawab para ulama untuk memelihara ketentraman bangsa Indonesia dalam hal ini umat Islam sebagai golongan mayoritas dengan memelihara bara patriotisme, heroisme dan kebencian terhadap penjajah.[16]

Sebelum melebur diri menjadi partai politik, aspirasi politik NU disalurkan melalui Masyumi. NU mengikuti setiap phase perjuangan secara seksama. Sedangkan keduduannya dalam Masyumi adalah sebagai anggota istimewa bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya seperti, PSII, Muhammadiyah, Al-Washilah dan lain-lain.[17]

Nahdhatul Ulama menjadi kekuatan politik nomor tiga seusai pemilu 1955, hal ini sangat memungkinkan

---

17. Drs. M. Rusli Karim. Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, sebuah potret pasang surut, Rajawali Pers Jakarta 1993, hal.102

18. Ibid hal. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena didukung oleh jumlah yang massa besar terutama di daerah pedesaan. NU sering dilukiskan sebagai pesantren dalam politik. Ini artinya bahwa peran kiai dalam partai ini demikian besar, hingga hampir-hampir tanpa batas. Saifuddin Zuhri menggambarkan Kiai Wahab Chasbullah sebagai tokoh yang berperan sangat dominan dalam perjalanan NU. Ia menulis :

> Adapun peranan NAHDLATUL 'ULAMA tidak dapat dipisahkan dengan peranan yang dilakukan oleh KIAI WAHAB. Mudah disimpulkan bahwa gerak harkat KIAI WAHAB mencerminkan gerak-joang NAHDLATUL 'ULAMA. Ini tidak berarti bahwa tokoh-tokoh lain dalam NAHDLATUL 'ULAMA tidak mempunyai peranan. Soalnya karena peranan KIAI WAHAB sangat menentukan, demikian menentukan sehingga apabila seluruh pimpinan bergabung tetapi minus KIAI WAHAB maka keputusantak dapat diambil. Tanpa KIAI WAHAB bukan lagi NAHDLATUL 'ULAMA.[18]

Pada masa orde baru, NU memperlihatkan dinamika sosial-politik yang agak berlainan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam Pemilu 1971, NU berhasil menduduki posisi kedua dibawah Golkar dan di atas parmusi. Suara yang diperoleh NU saat itu 18,6 % suara.

---

19. DR. A. Syafi'i Maarif, Islam dan Politik, Teori belah bambu masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)Gema Insani Pers Jakarta 1996, hal. 81-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi setalah ada kebijakan orde baru, yaitu melakukan deparpolisasi dalam rangka pembentukan sistem kepartaian yang hegemonik, maka setelah pemilu tahun 1971 terjadi fusi partai. NU bersama PSII, Perti dan Parmusi pada tanggal 5 Januari 1973 melebur dalam Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam perkembangan selanjutnya, unsur Parmusi dan NU saling bersaing untuk menduduki pucuk pimpinan PPP. Puncaknya, pada masa kepemimpinan PPP ditangan J. Naro, banyak sekali tokoh-tokoh yang disingkirkan dari jajaran pengurus partai. Kondisi inilah yang membuat tokoh-tokoh NU kecewa terhadap PPP. Akhirnya pada muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 di Situbondo, NU mengikrarkan diri kembali ke khitah '26. Artinya, secara organisatoris NU tidak terikat oleh salah satu golongan manapun.

b. PARMUSI

Upaya umat Islam saat itu untuk merehabilitasi Masyumi ternyata mendapat hambatan yang cukup berarti dari pemerintah. Apalagi secara jelas pemerintah menolak upaya tersebut. Sebagai pengganti dari Masyumi, melalui Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya tanggal 7 April 1967 berdirilah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Adapun pertimbangan politis pemerintah mendirikan Parmusi adalah :

1. Menjadi wadah politik resmi bagi Muslim modernis
2. Menyeimbangkan komposisi kekuatan partai politik.[19]

Tokoh-tokoh Masyumi saat itu menaruh harapan besar terhadap Parmusi, sebab partai ini akan menjadi partai yang representatif bagi umat Islam dan diharapkan nantinya orang-orang Masyumi akan menduduki kepengurusan didalamnya. Akan tetapi, pemerintah mengambil kebijakan lain, bahwa Parmusi tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi, ini artinya, tokoh-tokoh Masyumi tidak diperkenankan menduduki kepengurusan Parmusi.

Melalui SK Presiden no. 70, pemerintah mengangkat **Djarnawi Kusumo** dan **Lukman Harun** masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Parmusi. Akan tetapi kepemimpinan ini hanya bersifat sementara dan akan disempurnakan setelah mengadakan

---

20. Thaba, Op-cit hal. 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kongres di malang. Tampilnya dua tokoh ini, ternyata mendapat tantangan yang kuat dari J. Naro dan Imron Kadir (Naroka). Kedua tokoh yang disebut belakangan ini, mempunyai kedekatan dan hubungan yang erat dengan pemerintah. Kedua tokoh yang akomodatif dengan pemerintah ini akhirnya memecat kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun dengan alasan bahwa pemimpin Parmusi ini memusuhi ABRI dan akan menyusun personalia kepengurusan sendiri. Manuver politik Naroka ini akhirnya memicu konflik internal.

Untuk meredam konflik tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat HMS. Mintaredja dari Muhammadiyah untuk menjadi Ketua Umum. Persoalan tidak selesai begitu saja, sebab pada kepemimpinan Mintaredja pun, banyak menyingkirkan orang-orang Djarnawi-Lukman. Bahkan Daftar Calon Pemilu yang disusun oleh Djarnawi dan Lukman banyak dipangkas oleh LPU, dan semua mantan aktifis Masyumi disingkirkan.[20]

Disebabkan oleh konflik internal inilah, persoalan di Parmusi tak kunjung selesai. Hal ini berdampak pada kurang siapnya Parmusi untuk

---

21. Ibid hal. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi Pemilu 1971. Pada pemilu perdana ini Parmusi hanya mampu di urutan ketiga setelah Golkar dan NU, dengan perolehan 7,365 % suara.

Setelah Pemilu 1971, seiring dengan terbentuknya sistem kepartaian yang hegemonik, pemerintah mulai melancarkan kontrol militer dengan melakukan penetrasi dalam semua bidang dengan tujuan status quo dan memperlemah kekuatan-kekuatan yang dapat mengimbangi pemerintah.

c. PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH (PERTI)

Didirikan di Bukit Tinggi pada Tanggal 20 Mei 1930 dan berpusat di Bukit Tinggi. Para pendirinya dari para Ulama terkemuka, masing-masing: Syekh Suleman Rasuly, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Abbas Ladang Laweh, Syekh Abdul Wahid es Salihy dan Syekh Arifin Arsjady.[21]

Adapun bidang yang digarap adalah :

1. Memperdalam rasa cinta terhadap agama, bangsa dan tanah air
2. Memperhebat penyiaran dan pertahanan Agama Islam.

---

22. Karim, Op-cit hal. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia
4. Memajukan pengajaran, pendidikan dan kecerdasan rakyat
5. Memajukan perekonomian dan mengusahakan kemakmuran rakyat.[22]

Sedangkan dalam bidang politik mencakup :

1. Berjuang menetang kolonialisme yang menindas rakyat Indonesia
2. Memperjuangkan cita-cita nasional untuk menciptakan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur
3. Mengerahkan segala tenaga untuk membela pertahanan tanah air kearah pertahanan rakyat semesta (total people defence)
4. Memperjuangkan agar supaya Pancasila menjadi buah dan kenyataan di tengah-tengah masyarakat.
5. Mengadakan perhubungan dengan seluruh partai-partai di Indonesia untuk menciptakan satu persatuan nasional yang kuat terutama untuk melaksanakan program bersama (joint program)[23]

---

23. Ibid hal. 76

24. Ibid hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya, partai ini kurang berkembang, sehingga kurang dikenal dimasyarakat. Pada pemilu 1971 partai ini hanya memperoleh 2,39% suara. Selanjutnya partai ini mengadakan fusi ke PPP sebagaimana partai-partai Islam lainnya, karena mengikuti kebijakan politik orde baru.

d. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA (PSII)

Pada awal-awal berdirinya, partai ini lebih berorientasi pada masalah ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyaingi kegiatan dan kedudukan golongan Cina di bidang perdagangan dan perusahaan batik. Didirikan di Sala oleh H. Samanhudi pada tahun 1911.

Pada awal berdirinya, partai ini bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). Akan tetapi setelah dipegang oleh H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912 namanya berubah menjadi Syarekat Islam (SI). Dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto wajah SI lebih menampakkan citra politiknya.

Pada perkembangannya, SI mengalami perpecahan yang ditandai adanya tiga kelompok yaitu, golongan berhaluan komunis merah, berhaluan Islam radikal fanatik dan berhaluan nasional. Perubahan nama SI menjadi PSII terjadi pada tahun 1930.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i Maarif menulis, "seharusnya PSII merupakan partai yang paling berpengalaman. Partai ini pernah bergumul dengan sengit menghadapi PKI pada dekade kedua dan awal dekade ketiga abad ke 20. Tapi sejak perpisahannya dengan idiologi radikal Marxisme tahun 1920-an, partai ini tidak mampu lagi tampil sebagai kekuatan politik massa yang handal, sebagaimana peran yang pernah dimainkannya sampai 1916. Partai politik tertua ini setelah masa kejayaannya lampau, tidak pernah lagi diperhitungkan secara serius oleh lawan-lawannya ..."[24]

Analisa diatas diajukan karena mangingat minimnya pendukung massa partai ini. Pada pemilu pertama di masa orde baru partai ini hanya mampu mengumpulkan 0,70 % suara.

---

25. Maarif, Op-cit hal. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id